

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara

Syulhennisari Siregar¹
Mhd.Iqbal Tanjung²

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
syulhennisari.siregar@um-tapsel.ac.id¹
mhd.iqbal@um-tapsel.ac.id²

Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa DPRD sebagai lembaga Legislatif di daerah yang tugasnya membuat peraturan bersama dengan Kepala Daerah yang disebut Perda.

Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan Perda berdasarkan Hak Inisiatif DPRD di Kabupaten Paluta dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif Deskriptif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan $r_{xy} < t$ atau $0,037 < 1,958$ berarti koefisien tersebut berlaku untuk seluruh populasi dan sampel yang berjumlah 30 Anggota DPRD Kabupaten PALUTA. Sehingga H_0 ditolak H_a diterima, berarti Anggota DPRD dalam pembuatan Perda di Pemkab PALUTA dengan menggunakan hak inisiatif Dewan masih rendah.

Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hak Inisiatif, Peraturan Daerah

Abstract

In Constitution Number 23 Year 2014 regarding Regional Government stated that DPRD as legislative institution in area whose duty to make the regulation together with Head of Region called Perda.

The focus of this study was to determine what factors influenced the making of local regulations based on DPRD Initiative Rights in Paluta Regency under the title Factors Affecting the Making of Local Regulation Based on the Initiative Right of the Regional House of Representatives in Kabupaten Padang Lawas Utara.

The research method used is Quantitative Descriptive research method based on positivism philosophy, used to examine the population or a particular sample, data collection using research instruments and test the hypothesis that has been established.

From the results of the study can be concluded that the calculation of $r_{xy} < t$ or $0.037 < 1.958$ means the coefficient is applicable to the entire population and sample amounting to 30 Members of DPRD PALUTA. Hence H_a rejected H_0 accepted, meaning that the DPRD Member in making the law in PALUTA Regency by using the right of Council initiative still low.

Keywords: Regional House of Representatives, Right of Initiative, Local Regulation



PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga Legislatif di daerah yang tugasnya membuat peraturan bersama dengan kepala daerah yang disebut peraturan daerah (Perda). Perda yang dibuat merupakan ketentuan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif di daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah, dalam hal rancangan Perda dapat bersumber dari lembaga eksekutif dan legislatif hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi kabupaten/kota DPRD mempunyai hak inisiatif, menurut pasal 159 ayat (1) DPRD mempunyai hak Interpelasi, hak angket.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 ayat (2) tugas dan wewenang kepala daerah adalah “mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah atau masyarakat, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Fungsi Perda dalam permasalahan ini yaitu fungsi legislasi dimana fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar yang dimiliki oleh sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi ini bertujuan agar DPRD dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Kegiatan legislasi selalu identik dengan proses pembentukan sebuah undang-undang melalui DPRD aspirasi masyarakat ditampung, kemudian dari kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang yang dianggap sebagai representasi rakyat banyak yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintah daerah.

DPRD seharusnya melahirkan Perda yang menggunakan hak inisiatifnya dalam mengajukan usul Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Raperda). Hal ini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi,

karena kekuasaan legislasi DPRD merupakan inti kedaulatan rakyat.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan dengan pengamatan, hubungan antara Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Padang Lawas Utara tidak mencerminkan hubungan yang sejajar antara kedudukan lembaga tersebut, sehingga kedudukan legislatif daerah (DPRD) di posisikan di bawah eksekutif daerah.

Padang Lawas Utara disingkat menjadi PALUTA adalah hasil pemekaran dari Tapanuli Selatan tahun 2009. Dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2009. Saat ini adalah pemerintahan pertama oleh Bupati Bachrum Harahap.

Sejak PALUTA mekar tahun 2009-2015, Perda yang dihasilkan berjumlah 67 Perda. Dimana untuk tahun 2009 berjumlah empat Perda, tahun 2010 berjumlah 12 Perda, tahun 2011 berjumlah 12 Perda, tahun 2012 berjumlah delapan Perda, tahun 2013 berjumlah lima Perda, tahun 2014 berjumlah 21 Perda, tahun 2015 berjumlah lima Perda, untuk program pembentukan. Perda prioritas tahun 2016 ditetapkan sebanyak 18 Rancangan Perda. Usulan eksekutif sebanyak sepuluh Ranperda, usulan DPRD Kabupaten PALUTA Ranperda sebanyak lima Ranperda, usulan kumulatif terbuka sebanyak tiga Ranperda.

Berdasarkan pra penelitian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam dengan judul **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.**

Perumusan Masalah

Yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembuatan Perda di Kabupaten PALUTA.
2. Bagaimana pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD di Kabupaten PALUTA.



3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan Perda berdasarkan hak inisiatif DPRD di Kabupaten PALUTA.

Tujuan Penelitian

Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembuatan Perda di Kabupaten PALUTA.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD di Kabupaten PALUTA.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan Perda berdasarkan hak inisiatif DPRD di Kabupaten PALUTA.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk penulis, mempunyai pengalaman baru tentang penelitian utamanya masalah faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pembuatan perda berdasarkan hak inisiatif DPRD di Kabupaten PALUTA.
2. Untuk Pemkab Paluta, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau rujukan yang bermanfaat, sebagai arsip dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berwenang dalam pemerintah Kabupaten PALUTA dan seluruh masyarakat setempat.
3. Kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan merupakan solusi pemecahan masalah yang berhubungan dengan pembuatan Perda.

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif yang menurut Sugiyono "Pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan." (Sugiyono, 2009: 8)

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten PALUTA yang berjumlah 30 orang ditambah satu orang Kabag Persidangan, satu orang Kasubbag Persidangan dan satu orang Kabag Hukum Pemkab PALUTA

Sampel

Penggunaan teknik sampel yang dipilih adalah *Non Probability Sampling* yang memberikan peluang yang tidak sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik yang digunakan meliputi *Purposive Sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu untuk lembaga eksekutif, sedangkan untuk anggota DPRD PALUTA ditentukan dengan Sampling jenuh, semua anggota DPRD berjumlah 30 orang dijadikan sampel.

Defenisi Konsep

Untuk mengetahui pengertian konsep-konsep yang digunakan maka penulis membatasi konsep yaitu:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan perda adalah :
 - a. Kemampuan
 - b. Pengalaman
 - c. Ketersediaan waktu
 - d. Disiplin
2. Pemda adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Hak inisiatif adalah hak untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang atau Peraturan daerah (Raperda), merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi



5. Fungsi Legislasi adalah legislasi perda di tingkat Kabupaten/Kota untuk DPRD Kabupaten/Kota yang dibahas bersama Bupati/Walikota dalam Kabupaten PALUTA.

Defenisi Operasional

Defenisi Operasional adalah suatu batasan yang diberikan kepada satu variabel dengan cara memberikan arti atau mempersiapkan, memberikan suatu petunjuk operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel-variabel tertentu. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Indikator Variabel X (Pembuatan Perda)
 - a. Proses penyiapan rancangan perda
 - b. Proses mendapatkan persetujuan
 - c. Proses Pembahasan
 - d. Proses pengesahan oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD
2. Indikator Variabel Y (Hak Inisiatif)
 - a. Hak menyatakan pendapat seperti kemampuan, pengalaman, ketersediaan waktu, disiplin, pendidikan
 - b. Hak untuk mengajukan usulan Raperda

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data skunder.

1. Data primer diperoleh dari angket yaitu "sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui" (Suharsini, 2010:151). Dan Observasi, yaitu "teknik pengumpulan data yang mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian" (Mahi, 2011:77).
2. Data skunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai sumber referensi, baik tulisan dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Analisa dan Interpretasi Data

Untuk menganalisa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi langsung dilokasi penelitian yang berdasarkan angket, maka skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Menurut Sugiyono skala Likert adalah "skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial" (Sugiyono, 2009:107). Kemudian dianalisis menggunakan analisa data uji scoring, yaitu setiap jawaban :

- a. Sangat setuju diberi skor 3
- b. Setuju diberi skor 2
- c. Tidak setuju diberi skor 1

Kemudian dihitung kumulatifnya dan pada akhirnya dihitung rata-rata persentasenya.

Teknik Pengujian Hipotesis

Untuk dapat menjelaskan secara terperinci data yang telah terkumpul maka data-data akan diolah dengan *Korelasi Product Moment*, adapun perincian rumusan *Korelasi Product Moment* antara lain seperti yang tertera dibawah ini :

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

n = Jumlah anggota sampel

$\sum x^2$ = Jumlah dari nilai kuadrat nilai X

$\sum y^2$ = Jumlah dari nilai kuadrat nilai Y.

Selanjutnya untuk menguji signifikansi koefisien korelasi, dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji t dengan rumus :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Kabupaten Padang Lawas Utara

Padang Lawas Utara merupakan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Nama Padang Lawas

diambil dari bahasa Batak, “*Padang*” berarti tanah datar, “*Lawas*” berarti luas. Padang Lawas Utara berarti tanah yang luas. Ibukota kabupaten ini adalah Gunungtua. Gunungtua adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (ibukota) Kabupaten Padang Lawas Utara. Secara geografis terletak pada 01.0190-170-400-200 LU dan 99.0 260 090-990 520 040 BT. Luas Wilayah 77.589 Ha, topografi bergelombang dan berbukit ketinggian dari permukaan Laut 300-600 M.

Gambaran Umum Anggota DPRD Kabupaten PALUTA Tahun 2014-2019

Anggota DPRD Kabupaten PALUTA terdiri dari 30 orang. Susunan personalia pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten PALUTA terdiri atas tujuh Fraksi yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai PKB, Fraksi Partai PDIP, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Gabungan Pembangunan Nurani.

Komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten PALUTA terdiri dari Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Kehormatan.

Badan Legislasi DPRD berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten PALUTA Nomor 170/10/PIMP/2014, Badan Legislasi berfungsi menyusun Rancangan Program Legislasi Daerah yang membuat data urutan dan prioritas Raperda beserta alasannya untuk satu masa keanggotaan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.

Pembahasan

Dalam penelitian ini angket yang disebarkan kepada responden, maka dapat diuraikan beberapa pertanyaan dan penilaian skor dari pertanyaan responden tersebut. Angket variabel X memiliki 27 pertanyaan dan anket variabel Y memiliki delapan pertanyaan, ketentuan jawaban angket terdiri dari tiga pilihan yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju dan skor penilaiannya adalah sangat setuju diberi skor tiga, setuju diberi skor dua, tidak setuju diberi skor satu.

Pembuatan Perda (Variabel X)

Tabel 1. Pembuatan Perda Harus Sesuai Dengan Perundang-Undangan

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	23	69	76,7%
2.	Setuju	2	7	14	23,3%
3.	Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	83	100%

Tabel 2 Banyak Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Perda, Baik Itu Faktor Interen Maupun Eksteren

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	14	42	46,6%
2.	Setuju	2	16	32	53,4%
3.	Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	74	100%

Tabel 3 Faktor Interen Dapat dilihat Dengan Tingkat Pendidikan, Kemampuan, Pengalaman, Ketersediaan Waktu, Kedisiplinan

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	11	33	36,8%
2.	Setuju	2	18	36	59,9%
3.	Tidak Setuju	1	1	1	3,3%
Jumlah			30	74	100%

Tabel 4 Faktor Eksteren Dapat dilihat Dengan Ketersediaan Anggaran

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	9	27	29,9%
2.	Setuju	2	19	38	63,5%
3.	Tidak Setuju	1	2	2	6,6%
Jumlah			30	67	100%

Tabel 5 Pembuatan Perda Berdasarkan Adanya Persetujuan dan Pengesahan Oleh Eksekutif

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	8	24	26,6%
2.	Setuju	2	22	44	73,4%
3.	Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	68	100%



Tabel 6 Penyiapan Perda yang Berasal dari Eksekutif dan Legislatif Memerlukan Penjelasan dan Keterangan

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	10	30	33,3%
2.	Setuju	2	20	40	66,7%
3.	Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	70	100%

Tabel 7 Perda yang Berasal dari Usul Eksekutif di Balik ke Legislatif

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	11	33	36,5%
2.	Setuju	2	19	38	63,5%
3.	Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	71	100%

Tabel 8 Usulan Inisiatif DPRD disampaikan Lagi ke Eksekutif

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	10	30	33,3%
2.	Setuju	2	20	40	66,7%
3.	Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	70	100%

Tabel 9 Mekanisme Pembuatan Perda Harus Sesuai Proses Pembuatan Perda, Penyiapan Perda dan Rancangan Perda

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	10	30	33,3%
2.	Setuju	2	20	40	66,7%
3.	Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	70	100%

Tabel 10 Pembuatan Perda disampaikan Secara Tertulis Kepada Pimpinan disertai Penjelasan, Keterangan, Naskah Akademik Daftar Nama Lengkap Tanda Tangan dan Nomor Pokok Kesekretariatan

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	10	30	33,3%
2.	Setuju	2	20	40	66,7%
3.	Tidak Setuju	1	-	-	-

Jumlah	30	70	100%
--------	----	----	------

Tabel 11 Apakah Setiap Perda Mempunyai Naskah Akademik

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	9	27	29,9%
2.	Setuju	2	17	34	56,6%
3.	Tidak Setuju	1	4	4	13,5%
Jumlah			30	65	100%

Tabel 12 Belum Maksimalnya Ranperda dari Usulan Inisiatif DPRD di Sebabkan Tingkat Pendidikan Anggota DPRD

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	1	3	3,3%
2.	Setuju	2	3	6	9,9%
3.	Tidak Setuju	1	26	26	86,8%
Jumlah			30	35	100%

Tabel 13 Ada Tujuh Tingkatan Ranperda ke Perda Mulai dari Naskah Akademik Sampai Banmus

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	10	30	33,3%
2.	Setuju	2	20	40	66,7%
3.	Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	60	100%

Tabel 14 Dana yang diperlukan Dalam Penyiapan Ranperda

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	10	30	33,3%
2.	Setuju	2	20	40	66,7%
3.	Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	60	100%

Tabel 15 Pembahasan Ranperda ke Perda Memerlukan Waktu Tiga Bulan Mulai dari Usulan Sampai Pengesahan

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	10	30	33,3%
2.	Setuju	2	20	40	66,7%
3.	Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	60	100%

Tabel 16 Apakah Setiap Masa Reses Anggota DPRD Balik ke Dapil

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	14	42	46,5%
2.	Setuju	2	16	32	53,5%
3.	Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	74	100%

Tabel 17 Temuan di Dapil dibuat Dalam Bentuk Usulan

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	14	42	46,5%
2.	Setuju	2	16	32	53,5%
3.	Tdk Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	74	100%

Tabel 18 Anggota DPRD Harus Dapat Melihat Kenyataan Dalam Reses Adalah Masyarakat Dalam Ranperda

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	10	30	33,3%
2.	Setuju	2	20	40	66,7%
3.	Tdk Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	60	100%

Tabel 19 Tidak Tersedianya Data yang Lengkap Dalam Pembuatan Ranperda

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	-	-	-
2.	Setuju	2	5	10	16,6%
3.	Tdk Setuju	1	25	25	83,4%
Jumlah			30	35	100%

Tabel 20 Anggota DPRD Tidak Mempunyai Pegawai

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	7	21	23,3%
2.	Setuju	2	20	40	66,8%
3.	Tdk Setuju	1	3	3	9,9%
Jumlah			30	64	100%

Tabel 21 Hasil Kajian Legislatif disampaikan Kepada Pimpinan Dalam Rapat Paripurna

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	8	24	26,6%
2.	Setuju	2	22	44	73,4%
3.	Tdk Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	68	100%

Tabel 22 Raperda yang Telah dikaji disampaikan Oleh Pimpinan Kepada Anggota DPRD Selambatnya Tujuh Hari Sebelum Rapat Paripurna DPRD

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	8	24	26,6%
2.	Setuju	2	22	44	73,4%
3.	Tdk Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	68	100%

Tabel 23 Dalam Rapat Paripurna Pengusul Memberi Penjelasan dan dijawab Oleh Pengusul Persetujuan dengan diterima atau ditolak

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	5	10	16,6%
2.	Setuju	2	25	25	83,4%
3.	Tdk Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	35	100%

Tabel 23 Bagaimana Pemahaman Saudara Tentang Panitia Khusus

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	14	42	46,5%
2.	Setuju	2	16	32	53,5%
3.	Tdk Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	74	100%

Tabel 24 Sesudah Pengesahan Berapa Jumlah Perda Masuk ke Panitia Khusus

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	8	24	26,6%
2.	Setuju	2	22	44	73,4%
3.	Tdk Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	68	100%



Tabel 25 Pembahasan Ranperda Selalu Setiap Perda itu Melalui Panitia Khusus

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	17	51	66,6%
2.	Setuju	2	13	26	43,4%
3.	Tdk Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	77	100%

Tabel 26 Lobi-lobi Dalam Pembahasan Perda Sangat di Perlukan diluarRapat Paripurna

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	11	33	36,6%
2.	Setuju	2	19	38	63,4%
3.	Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	71	100%

Tabel 27 Rekapitulasi Hasil Jawaban Angket Tentang Pembuatan Perda

No	No Angket	Jawaban			Jlh
		Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	
1.	1	4	21	2	27
2.	2	10	14	3	27
3.	3	11	13	3	27
4.	4	13	10	4	27
5.	5	9	14	4	27
6.	6	10	15	2	27
7.	7	11	14	2	27
8.	8	8	17	2	27
9.	9	12	13	2	27
10.	10	9	16	2	27
11.	11	11	14	2	27
12.	12	7	18	2	27
13.	13	14	11	2	27
14.	14	7	18	2	27
15.	15	9	16	2	27
16.	16	7	18	2	27
17.	17	10	15	2	27
18.	18	8	17	2	27
19.	19	6	19	2	27
20.	20	9	16	2	27
21.	21	8	17	2	27
22.	22	12	13	2	27
23.	23	11	14	2	27
24.	24	8	17	2	27
25.	25	7	18	2	27
26.	26	10	15	2	27

27.	27	6	19	2	27
28.	28	11	14	2	27
29.	29	7	18	2	27
30.	30	6	19	2	27
Jlh	250	473	66		810
f/N x 100 %	30,86 %	58,3 9%	8,1 4%		100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Dari data rekapitulasi hasil jawaban angket tentang pembuatan perda diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 250 jawaban responden yang memilih sangat setuju, memilih setuju 473 jawaban dan memilih tidak setuju 66 jawaban. Dengan demikian responden yang paling banyak menjawab setuju.

Hak Inisiatif (Variabel Y)

Tabel 28 Tidak Ada Hak Inisiatif DPRD Pemkab PALUTA Sampai Dalam Anggaran Tahun 2015

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	30	90	100%
2.	Setuju	2	-	-	-
3.	Tdk Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	90	100%

Tabel 29 Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Berhubungan Dengan Faktor Interen dilihat Dengan Tingkat Pendidikan, Kemampuan, Pengalaman, Ketersediaan Waktu, Kedisiplinan

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	4	12	13,3%
2.	Setuju	2	26	52	86,7%
3.	Tdk Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	64	100%

Tabel 30 Hak Inisiatif DPRD Menggali Menyiapkan Pembahasan Dalam Rapat Paripurna

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	16	32	53,5%
2.	Setuju	2	14	42	46,5%
3.	Tdk Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	74	100%



Tabel 31 Penyiapan Ranperda Dalam Usulan Hak Inisiatif disampaikan Secara Tertulis Kepada Pimpinan disertai Penjelasan Sampai ke Banmus

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	10	30	33,3%
2.	Setuju	2	20	40	66,7%
3.	Tdk Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	60	100%

Tabel 32 Bagaimana Anggota DPRD Mengeluarkan Dana Dalam Penyiapan Rapat Paripurna

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	8	24	26,6%
2.	Setuju	2	22	44	73,4%
3.	Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	68	100%

Tabel 33 Bagaimana Menyiapkan Naskah Akademik Agar Menjadi Usulan Ranperda Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	5	10	16,6%
2.	Setuju	2	25	25	83,4%
3.	Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	35	100%

Tabel 34 Apa yang Menjadi Faktor Belum Terlaksananya Hak Inisiatif DPRD Pemkab PALUTA

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	1	3	3,3%
2.	Setuju	2	-	-	-
3.	Tidak Setuju	1	29	29	96,7%
Jumlah			30	32	100%

Tabel 35 Bagaimana Kedepannya Dalam Mengajukan Usulan Ranperda Lima Tahun Kedepan

No	Jawaban	Nilai	Frek	Score	%
1.	Sangat Setuju	3	5	10	16,6%
2.	Setuju	2	25	25	83,4%
3.	Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah			30	35	100%

Tabel 36 Rekapitulasi Hasil Jawaban Angket Tentang Hak Inisiatif

No	No Angket	Jawaban			Jlh
		Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	
1.	1	1	6	1	8
2.	2	3	4	1	8
3.	3	3	4	1	8
4.	4	3	4	1	8
5.	5	3	4	1	8
6.	6	2	5	1	8
7.	7	3	4	1	8
8.	8	3	4	1	8
9.	9	2	5	1	8
10.	10	3	4	1	8
11.	11	4	3	1	8
12.	12	3	4	1	8
13.	13	4	3	1	8
14.	14	4	3	1	8
15.	15	2	5	1	8
16.	16	3	4	1	8
17.	17	2	5	1	8
18.	18	3	4	1	8
19.	19	2	5	1	8
20.	20	2	5	1	8
21.	21	5	2	1	8
22.	22	2	5	1	8
23.	23	2	5	1	8
24.	24	3	4	1	8
25.	25	2	5	1	8
26.	26	2	5	1	8
27.	27	3	4	1	8
28.	28	2	5	1	8
29.	29	3	4	1	8
30.	30	4	3	1	8
Jumlah		83	127	30	240
f/N x 100 %		34,58%	52,91 %	12,5 %	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Dari data rekapitulasi hasil jawaban angket tentang hak inisiatif diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 83 jawaban responden yang memilih sangat setuju, memilih setuju 127 jawaban dan memilih tidak setuju 30 jawaban. Dengan demikian responden yang paling banyak menjawab setuju.

Tabel 37 Rekapitulasi Hasil Hitung

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	57	19	3249	361	1083
2	59	18	3481	324	1062
3	63	18	3969	324	1134
4	63	18	3969	289	935
5	54	18	2916	324	972
6	62	17	3844	289	1054
7	72	17	5184	289	1224
8	60	18	3600	324	1080
9	65	17	4225	289	1105
10	61	18	3721	324	1098
11	63	19	3969	361	1197
12	60	18	3600	324	1080
13	66	19	4356	361	1254
14	59	19	3481	361	1121
15	61	17	3721	289	1047
16	59	18	3481	324	1062
17	58	17	3364	289	986
18	59	18	3481	324	1062
19	58	17	3364	289	986
20	61	17	3721	289	1037
21	59	37	3481	1369	2183
22	64	17	4096	289	1088
23	64	17	4096	289	1088
24	60	17	3600	289	1020
25	59	17	3481	289	1003
26	62	17	3844	289	1054
27	58	18	3364	324	1044
28	60	18	3600	324	1080
29	59	17	3481	289	1003
30	55	17	3025	289	935
Jumlah	1820	549	110764	10388	33079

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik korelasi *Product Moment* yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien Korelasi antara x dan y
 N = Jumlah Responden
 $\sum XY$ = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y
 $\sum X$ = Jumlah seluruh skor X
 $\sum Y$ = Jumlah seluruh skor Y
 $\sum X^2$ = Jumlah hasil perkalian seluruh skor X
 $\sum Y^2$ = Jumlah hasil perkalian seluruh skor Y

Untuk memperoleh harga indeks korelasi *product moment* r_{xy} dari tabel hasil hitung rekapitulasi yaitu:

$$\begin{aligned} \sum X &= 1820 \\ \sum Y &= 549 \\ \sum X^2 &= 110764 \\ \sum Y^2 &= 10388 \\ \sum XY &= 33079 \end{aligned}$$

Dengan mendistribusikan nilai-nilai diatas ke dalam rumus korelasi *product moment* diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned} r_{xy} &= \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}} \\ &= \frac{30(33079 - (1820)(549))}{\sqrt{\{30(110764 - (1820)^2)\} \{30(10388 - (549)^2)\}}} \\ &= \frac{992370 - 999180}{\sqrt{\{3322920 - 33124\} \{311640 - 301401\}}} \\ &= \frac{-6810}{\sqrt{(3289796)(10239)}} \\ &= \frac{-6810}{\sqrt{33684}} \\ &= \frac{-6810}{183,5320} \\ &= 0,037 \end{aligned}$$

Selanjutnya untuk mengetahui signifikan atau tidaknya korelasi antara Variabel X (Pembuatan Perda) dengan Variabel Y (Hak Inisiatif) dibuktikan dengan membandingkan antara r_{xy} hasil perhitungan dengan r tabel *product moment* pada n = 30 dan taraf kepercayaan 95% atau kesalahan 5% dengan derajat



kebebasan $(dk) = N - 2 = 30 - 2 = 28$. Berdasarkan tabel harga "r" pada taraf signifikan 5%.

Berdasarkan perbandingan antara r_{hitung} dengan r_{tabel} terlihat bahwa $r_{hitung} < r_{tabel}$ ($0,037 < 0,361$). Maka dari hasil konsultasi tersebut, hipotesis alternatif yang dirumuskan dalam penelitian tidak dapat diterima atau disetujui kebenarannya. Berarti Anggota DPRD dalam pembuatan Perda di Pemkab PALUTA dengan menggunakan hak inisiatif Dewan masih rendah.

4.6 Koefisien Uji Signifikan

Untuk menguji signifikansi yaitu apakah hubungan yang ditemukan itu berlaku untuk seluruh populasi yang berjumlah 30 Anggota DPRD Kabupaten PALUTA, maka perlu diuji signifikansinya. Rumus uji signifikansi korelasi *product moment* dapat dihitung dengan cara uji t.

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

$$t = \frac{0,037 \sqrt{30 - 2}}{\sqrt{1 - (0,037)^2}}$$

$$t = \frac{0,037 \sqrt{28}}{\sqrt{1 - 0,0013}}$$

$$t = \frac{0,037 \times 52915}{\sqrt{0,9987}}$$

$$t = \frac{-1,957,855}{0,9993}$$

$$t = 1,958$$

Dengan demikian dapat ditentukan bahwa $r_{xy} < t$ atau $0,037 < 1,958$ berarti koefisien tersebut berlaku untuk seluruh populasi dan sampel yang berjumlah 30 Anggota DPRD Kabupaten PALUTA. Sehingga H_a ditolak H_o diterima, berarti Anggota DPRD dalam pembuatan Perda di Pemkab PALUTA dengan menggunakan hak inisiatif Dewan masih rendah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Pembuatan Perda di Kabupaten PALUTA adalah :
 - Disampaikan secara tertulis kepada pimpinan disertai penjelasan, keterangan, Naskah Akademik.
 - Pimpinan DPRD disampaikan kepada Baleg untuk dikaji.
 - Hasil Kajian Baleg disampaikan kepada pimpinan dalam rapat paripurna.
 - Raperda yang telah dikaji disampaikan kepada anggota DPRD selambatnya tujuh hari sebelum rapat paripurna DPRD,
 - Persetujuan dengan diterima atau ditolak.
 - Raperda usul Inisiatif disampaikan kepada Gubernur.
- Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD di Kabupaten PALUTA sudah baik, karena usulan Ranperda anggota DPRD Pemkab PALUTA sudah dalam proses di Tahun 2016 ini dengan jumlah enam Ranperda.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan Hak Inisiatif DPRD di Kabupaten PALUTA yaitu :
 - Adanya Faktor Interen terhadap anggota DPRD yang dapat dilihat dengan tingkat mutu pendidikan, kemampuan, pengalaman, ketersediaan waktu dan kurangnya kedisiplinan.
 - Adanya faktor eksteren yang dapat dilihat dengan minimnya anggaran untuk Ranperda.
- Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan $r_{xy} < t$ atau $0,037 < 1,958$ berarti koefisien tersebut berlaku untuk seluruh populasi dan sampel yang berjumlah 30 Anggota DPRD Kabupaten PALUTA. Sehingga H_a ditolak H_o diterima, berarti Anggota DPRD dalam pembuatan Perda di Pemkab PALUTA dengan menggunakan hak inisiatif Dewan masih rendah.



Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan:

1. Kepada anggota DPRD Kabupaten PALUTA agar menggunakan Hak Inisiatifnya dalam pembuatan Perda ditingkatkan lagi supaya berjalan dengan baik.
2. Kepada anggota DPRD Kabupaten PALUTA lebih disiplin waktu dan betul-betul menggunakan dalam rapat paripurna masa resesnya sesuai dengan Konstituennya.

PERATURAN/ PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Efriza, Djadjiono. 2011. *Wakil Rakyat tidak Merakyat*. Jakarta: Alfabeta.
- Formappi, 2005. *Lembaga Perwakilan Rakyat di Inodonesia*. Jakarta: Formappi.
- Hikmat, M. Mahli. 2011. *Metode penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Bandung: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Menejemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Jakarta: Alumni.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Fustaka Setia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsul, Inosentius. 2002. *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPR*. Jakarta: Adekasi.
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso. 2009. *Meningkatkan Kinerja DPRD*. Bandung: Fokusmedia.
- Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol 16 Nomor 3, September 2008.